

Pemberdayaan Masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) Jambi Melalui Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan di Desa Pauh Menang (SPA) Kabupaten Merangin Provinsi Jambi

Reziska Maya Kumala¹ Tohap Pandapotan Simaremare² Heri Usmento³

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia^{1,2,3}

Email: reziskamayakumala141@gmail.com¹

Abstrak

Latar belakang pada penelitian ini menunjukkan masalah bahwa terapat anak-anak Suku anak Dalam (SAD) yang belum mendapatkan hak di dalam pemenuhan hak pendidikan terhadap anak-anak Suku anak Dalam (SAD). Ha itu di sebabkan karena beberapa faktor di dalam pemenuhan hak pendidikan tersebut.. Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana pemenuhan hak pendidikan untuk anak-anak Suku anak Dalam (SAD) yang berada di daerah Pamnang tepatnya di Desa Pauh Menang (SPA). Penelitian ini dilakukan di kawasan Suku Anak Dalam (SPA) yang berada di Desa Pauh menang (SPA), Kabupaten Merangin. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Informan yang di dapat melaui informasi yang di dapat melalui Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa di dalam pemenuhan hak Pendidikan terhadap anak-anak Suku Anak Dalam (SAD) masih belum maksimal hal tersebut dibuktikan dengan adanya anak-anak yang belum mengakses Pendidikan itu sendiri, selain itu juga banyak anak-anak yang putus sekolah dan memilih untuk membantu orang tua-nya bekerja di kebun. Kemudian kendala dalam pemenuhan hak Pendidikan itu terhadap anak-anak Suku Anak Dalam (SAD) yang berada di Desa Pauh Menang (SPA) yakni: 1) dari penelitian tersebut, ditemukan bahwa anak-anak yang putus sekolah kebanyakan terkendala pada ekonomi keluarga yang kurang mencukupi, 2) banyak orang tua yang belum sadar akan pentingnya Pendidikan untuk anak-anak mereka sehingga banyak orang tua yang melarang anak nya untuk sekolah, 3) kurangnya tindak lanjut oleh pemerintah di dalam melaksanakan pemenuhan hak Pendidikan. Kesimpulanya yaitu anak-anak Suku anak Dalam (SAD) yang berada di Desa Pauh Menang (SPA) masih banyak yang belum mendapat hak pendidikan bahkan ada yang telah bersekolah akan tetapi memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan tersebut di karenakan ada beberapa faktor yang menjadi penghambat atau kenadala. Ekonomi, infrastruktur serta orag tua merupakan faktor yang menjadi penghambat di dalam pelaksanaa pemenuhan hak pendidikan itu sendiri.

Kata Kunci: Pemenuhan Hak Pendidikan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam rangka mengembangkan potensi manusia yang meliputi ilmu agama, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan sebagai warga negara dan anggota masyarakat, pendidikan adalah segenap daya upaya untuk mengubah sikap dan perilaku yang dikehendaki masyarakat. KH Dewantara (1961) mendefinisikan pendidikan sebagai segala daya upaya orang tua yang diarahkan kepada anak agar anak dapat berkembang dalam kehidupannya. Lebih jauh, pendidikan juga disebut sebagai daya upaya untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia, cerdas, dan sehat. Pelaksanaannya harus menyeluruh, realistis, dan terencana, serta berpotensi menghasilkan manusia yang cerdas yang dilandasi oleh asas-asas ideologi pendidikan. Pendidikan sendiri harus dilakukan secara terus menerus, agar dapat menunjukkan bahwa pendidikan sendiri sebagai perkembangan diri. Pada

negara- negara maju maupun negara yang masih tergolong di dalam golongan negara adidaya serta negara berkembang tidak dapat di pungkiri lagi bahwa setiap warga negaranya membutuhkan pendidikan, tanpa disadari bahwasanya pendidikan merupakan suatu sumber utama dan menjadi sebab tolak ukur apakah negara tersebut dapat mensejahterakan warga negaranya atau rakyatnya, baik di dalam mencukupi kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder serta kebutuhan tersier. "Negara mengutamakan anggaran pendidikan paling sedikit 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan keperluan penyelenggaraan pendidikan nasional," sesuai dengan Pasal 31 Ayat 4 UUD 1945. Namun kurangnya penekanan pada pelatihan guru, kurikulum yang tidak terkini, kualitas pengajaran yang terabaikan serta tidak memadai sarana prasarana penunjang pendidikan hal tersebut yang dikemukakan oleh Michael Fullan (2007). Jika kita cermati, kita dapat melihat bahwa fondasi keberhasilan negara-negara industri adalah penekanan mereka pada sektor pendidikan. Menurut Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, "Setiap orang berhak memperoleh pendidikan," pendidikan telah dianggap sebagai hak asasi manusia di Indonesia.

Pemerintah yang dibantu oleh lembaga Non Pemerintah Seperti, Warung Informasi Konservasi (WARSI) yang melakukan Pemberdayaan terhadap masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) menyadari bahwa pentingnya peran pendidikan bagi bangsa di tandai dengan adanya kebijakan pendidikan, investasi dalam pelatihan guru, program pemberian beasiswa serta perbaikan dalam statistik pendidikan. Sehingga mereka memberikan perhatian lebih pada sektor pendidikan. Hal tersebut juga ditandai dengan adanya Pasal 31 ayat (4) yang berbunyi "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 Hal tersebut juga ditandai dengan adanya Pasal 31 ayat (4) yang berbunyi " Negara memprioritaskan anggaran Pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. (Inkiriwang 2020). Usaha yang dilakukan pemerintah di dalam melakukan pemenuhan hak- hak pendidikan tersebut pada faktanya masih ada masyarakat yang belum merasakan hak tersebut diperoleh pada sebagian masyarakat. Salah satunya pada Masyarakat Suku Anak Dalam (SAD). Suku yang dikenal dengan Suku Anak Dalam (SAD) tinggal di Provinsi Jambi, salah satu provinsi di Pulau Sumatera. Provinsi Jambi sendiri merupakan bagian dari Sumatera, salah satu pulau terbesar di Indonesia. Jambi juga merupakan salah satu Provinsi yang memiliki banyak keanekaragaman suku, budaya, bahasa, serta kekayaan alam dan keragaman hayati maupun hewani yang dianugerahkan oleh Allah SWT.

Jambi mempunyai wilayah atau kawasan yang terdiri dari beberapa daratan dan perairan yang dihuni oleh masyarakat pedesaan, perkotaan, bahkan di Provinsi Jambi sendiri juga terdapat adanya kehidupan masyarakat sosial budaya yang tergolong masyarakat yang terpinggirkan dimana masyarakat yang menggunakan kebiasaan hidup nomaden adalah pada masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) atau yang sering dikenal dengan sebutan Orang Rimba. Di dalam buku Jared Diamond (2015) yang berjudul "The World Until Yesterday " menyatakan bahwasanya Suku Anak Dalam (SAD) sendiri merupakan suku masyarakat yang terpinggirkan dan suku tertua yang tandai dengan adanya bukti tradisi lisan, peninggalan Arkeologi yang berbentuk temuan artefak serta pemukiman kuno, kajian budaya dan etnografi serta pengakuan pemerintah tentang keberadaan Suku Anak Dalam (SAD) yang ada di Provinsi Jambi, karena telah ada dan menetap sejak zaman nenek moyang yang telah ada ratusan tahun yang lalu yang beraktivitas dengan kebiasaan hidup secara seminomaden yang bertempat tinggal yang berpindah pindah dari tempat satu ke tempat yang lainya dengan kurun waktu yang cukup lama dan melangsungkan kehidupan serta beraktivitas di dalam kawasan hutan. (Feneteruma, 2016) Sekitar delapan kabupaten—Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin, Kabupaten Muaro Bungo, Kabupaten Muaro Tebo, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muara Jambi,

Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur—adalah rumah bagi Suku Anak Dalam (SAD), salah satu suku di provinsi tersebut. komunitas yang lebih terisolasi. Kabupaten-kabupaten ini dibedakan berdasarkan gaya hidup tradisional hutan dan upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat, termasuk Toko Informasi Konservasi (WARSI) dan Sobat Eksplorasi Anak Dalam (SEAD).

Kabupaten Merangin sendiri merupakan salah satu tempat Kawasan dimana Suku Anak Dalam (SAD) Melangsungkan hidupnya. Salah satunya yaitu di wilayah Kecamatan Pamenang, tepatnya di Desa Pauh Menang (SPA). Desa pauh Menang merupakan salah satu desa di wilayah Kabupaten Merangin yang telah banyak dihuni oleh masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) dengan mata pencaharian mereka adalah dengan cara Kulong (berkebun atau bercock tanam) dan Megari (Berburu). Masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) yang ada di Desa Pauh Mennag (SPA) sendiri di pimpin oleh Tumenggung atau tetua adat mereka di dalam melangsungkan kehidupan mereka, dimana di dalam kepemimpinan ini Temenggung sendiri di pimpin oleh Bapak Ngilo. Kehidupan masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) memiliki berbaai kebudayaan luhur yang sangat banyak seperti menggunakan pola hidup yang penuh dengan kesederhanaan dan sistem kepemimpinan yang masih menggunakan sistem tradisional. Namun adanya perkembangan zaman pada saat sekarang ini sedikit demi sedikit mereka telah mengikuti zaman perembangan zaman tersebut. Jika dilihat pada sektor pendidikan, anak-anak pada Suku Anak Dalam (SAD) Cukup memprihatinkan. Ada beberapa fenomena disaat penulis melakukan observasi lapangan dimana pada umumnya anak-anak pada Suku Anak Dalam (SAD) ialah mengikuti orang tua ke kebun untuk Kulong (berkebun dan bercocok tanam) dan Megari (berburu), selain itu juga faktor sosial budaya yang telah berkembang di ten gah-tengah kehidupan masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) seperti, bersekolah tidak akan bisa menjanjikan untuk menjadikan kehidupan lebih baik.

Banyak faktor yang membuat anak-anak pada Suku Anak Dalam (SAD) tidak memperoleh hak pendidikan dikarenakan beberapa faktor. Menurut Aulia (2020) ada beberapa faktor yaitu faktor orang tua, faktor perekonomian, serta faktor infrastruktur hal ini berakar karena adanya beberapa argumen yang digunakan yaitu salah satunya adalah pentingnya penjagaan tradisi yang ada di dalam lingkup masyarakat Suku Anak dalam (SAD), tingkat stigma dan deskriminasi terhadap Suku Anak Dalam (SAD) serta keterbatasan sumber daya alamnya.(Hapsari, 2020) Pendidikan sendiri sangat penting utnuk kehidupan Suku Anak Dalam (SAD) di dalam menghadapi perkembangan zaman pada saat ini, Menurut buku Butet Manurung (2014), kemajuan terkini tentang “Sokola Rimba”. Di dalam pelaksanaa Sokola Rimba, Butet Manurung mendapatkan beberapa rintangan serta hambatan terutama pada orang tua Suku Anak Dalam (SAD) yang masih sangat rendah terhadap kesadaran akan pentingnya Pendidikan, namun pada akhirnya Bute Manurung perlahan-lahan berhasil mendidrikan Sokola Rimba tersebut sehingga sekarang sudah banyak mendapatkan anak didika pada Suku Anak Dalam (SAD). (Butet Mnaurung, 2014) Sebanyak 17 orang anak yang ada di masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) hanya ada beberapa anak yang mengenyam pendidikan baik itu di SD,SMP, maupun SMA bahkan ada juga beberapa anak yang rela memutuskan pendidikannya. Faktor pengaruh yang menyebabkan kesadaran akan pentingnya pendidikan di kalangan masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) di Desa Pauh Menang (SPA) tersebut masih tergolong sangat rendah yaitu di sebabkan oleh kondisi ekonomi serta insfrastruktur yang kurang memadai, akan tetapi faktor yang lebih utama adalah karena adanya larangan dari orang tua mereka untuk mendapatkan pendidikan tersebut. Hal itu dikarenakan orang tua pada Masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) masih memegang teguh pepatah “ Mendingan bodoh dari pada pinter tapi digunakan untuk minterin orang lain”, selain itu juga mereka masih mempertahankan adat dan kebudayaan mereka dimana mereka mengkhawatirkan dan

mencurigai dengan adanya pendidikan malah akan mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap kebudayaan mereka. Menurut skripsi milik Eci Trindika Aulia, mahasiswa lulusan jurusan pendidikan sejarah Universitas Batanghari dengan judul “Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Pada Masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) di Desa Mentawak, kab. Merangin”. Skripsi ini menjelaskan tentang pokok permasalahan dimana masih kurangnya pemberdayaan pada masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) melalui pemenuhan hak-hak pendidikan karena adanya hambatan di dalam proses pemenuhan hak-hak tersebut. Peneliti hanya berfokus pada pemberdayaan masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) saja. Oleh karena itu, adapun yang membedakannya dengan penelitian ini adalah terletak pada objek kajian penelitian pada Suku Anak Dalam (SAD) di Desa Pauh Menang (SPA), Kec. Pamenang, Kab. Merangin yang terfokuskan pada Pemberdayaan Masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) di dalam memperoleh hak-hak pendidikan pada anak.

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan di atas, sehingga penulis tertarik melakukan penulisan proposal skripsi dengan judul : “ Analisis Pemberdayaan Masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) dalam memperoleh Hak- Hak pendidikan pada Anak Di Desa Pauh Menang (SPA) Kec. Pamenang, Kab. Merangin” Dari latar belakang yang telah di jelaskan oleh penulis di atas, dapat diketahui bahwa peneliti memfokuskan pada permasalahan untuk mengetahui bagaimana strategi pemberdayaan yang di lakukan untuk masyarakat Suku Anak (SAD) untuk memperoleh hak-hak atas pendidikan di Desa Pauh Menang, Kec. Pamenang, Kab. Merangin, kemudian apa saja faktor penghambat di dalam pemenuhan hak-hak pendidikan bagi masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) tersebut. Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah dari metode penelitian kualitatif ini adalah sebagai berikut: Strategi apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah di dalam upaya pemberdayaan Masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) untuk mendapatkan hak pendidikan? Faktor-Faktor yang menjadi hambatan di dalam pemenuhan hak-hak pendidikan bagi Masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) di Desa Pauh Menang (SPA) di Kabupaten Merangin? Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk mengungkapkan yang hendak dicapai oleh penulis. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan yang dilakukan terhadap Masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) dalam memperoleh hak-hak pendidikan pada anak di saat sekarang ini, serta hambatan seperti apa yang mereka temui di dalam pelaksanaan pemerdayaa tersebut saat di laksanakan di Desa Pauh Menang (SPA) Kabupaten Merangin, serta apa saja yang menjadi kendala dalam hal tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono dalam bukunya metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D, mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang ilmiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci (Sugiyono,2017). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif karena semua data yang diperoleh dalam bentuk hasil interview dan dilakukan dengan cara bertatap muka dengan menggunakan instrumen pengumpulan data secara observasi, wawancara, dan dokumentasi dimana Penelitin ini juga merupakan suatu jenis penelitian berdasarkan studi kasus. Penelitian juga menggunakan metode empiris dan yuridis dimana di dalam setiap implementasi yang dilakukan atau ketentuan-ketentuan hukum yang di berlakukan secara langsung pada setiap peristiwa yang terjadi didalam masyarakat telah di atur di dalam perundang-undangan. (Salim, 2019) Dalam pengumpulan data, peneliti memerlukan alat pengumpul data atau instrument penelitian karena peneliti dituntut untuk menemukan data dari suatu peristiwa, fenomena dan dokumen tertentu yang kemudian

dianalisis dan ditariklah sebuah kesimpulan dari data tersebut (Ibid, 2006). Dalam penelitian ini instrument penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Metode Observasi. Menurut Nasution dalam buku Sugiyono, observasi adalah dasar ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi (Sugiyono, 2013). Dalam Penelitian ini peneliti turun langsung ke (SPA) serta melihat langsung bagaimana Pendidikan pada Suku Anak Dalam (SAD) yang berada di Kawasan Desa Pauh Menang (SPA)
2. Metode Wawancara. Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur. Dimana peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis dan juga alternatif jawaban yang telah dipersiapkan (Ibid, 2006). Wawancara dilakukan bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam dari berbagai objek penelitian guna mendukung hasil daripada observasi. Adapun tujuan dari diadakannya wawancara dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi dari para sumber tentang bagaimana strategi dan kendala di dalam melakukan pemenuhan hak Pendidikan bagi anak-anak Suku Anak Dalam (SAD) yang berada di Desa Pauh Menang (SPA), Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin.
3. Metode Dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah lalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, video atau karya monumental dari seseorang (Ibid, 2006). Hasil dari pengumpulan data melalui observasi dan wawancara akan dapat dipercaya apabila dibuktikan dengan menyertakan dokumentasi. Oleh karena itu, dalam penelitian peneliti akan menyertakan data dokumen berupa gambar, tulisan, dan foto saat wawancara pada narasumber mengenai pemenuhan hak Pendidikan itu sendiri.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini adalah hasil analisis data yang peneliti peroleh melalui wawancara yang dilakukan pada tanggal 05 April 2024 – 05 Juli 2024. Wawancara dilakukan di Desa Pauh Menang, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin terhadap Kepala Desa, Lembaga Warsi, Temenggung, Orang tua, serta anak-anak Suku Anak Dalam (SAD). Hasil penelitian ini selanjutnya dijabarkan dalam 3 kategori, yaitu deskripsi lokasi/objek, deskripsi temuan penelitian dan pembahasan.

Deskripsi Identitas Lingkup Perumahan Suku Anak Dalam (SAD) Desa Pauh Menang (SPA) Merangin

Desa Pauh menang merupakan desa eks Transmigrasi yang berawal dari unit pemukiman Transmigrasi (UPT) SPA Kubang Ujo yang di tempati dan diresmikan menjadi Desa Pauh Menang pada tahun 1988 tepatnya di kawasan Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin. pemberdayaan yang berkembang di Desa Pauh Menang sebagai desa eks Transmigrasi dan pulau jawa adalah kesenian jawa. Sampai saat ini Desa Pauh Menang terdiri dan 3 Dusun, 15 RT, dan 3 RW. dengan demikian perkembangan penduduk relative cukup pesat sesuai dengan situasi perekonomian dan perkembangan kecamatan Pamenang mengingat wilayah Desa Pauh Menang yang sangat strategis dimana pada saat sekarang ini desa tersebut di pimpin oleh Bapak Ngadiran, S.E sebagai Kepala Desa. Di Desa Pauh Menang sendiri terdapat perumahan khusus Suku Anak Dalam (SAD) Merupakan perumahan pertama yang didirikan di Desa tersebut. Perumahan tersebut telah berdiri sejak tahun 2015 tepatnya pada tanggal 30 Oktober yang di pimpin oleh Temenggung yang bernama Bapak Ngilo dari Tahun 2015 sampai saat sekarang ini . Perumahan tersebut telah di sahkan secara serentak oleh mantan Presiden yang ke-7 yaitu Bapak Ir.H. Joko Widodo yang berada di kawasan Bukit 12 di Daerah Bukit Suban Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun. Pemukiman penduduk yang menempati perumahan Suku Anak Dalam (SAD) yang di pimpin oleh Bapak Ngilo yang berada di Desa Pauh

Menang (SPA), merupakan penduduk pertama yang menempati perumahan tersebut yang sebelumnya masih berpenghuni di Kawasan hutan milik warga sekitar yang berada di daerah Desa Rejosari yang masih berada di lingkup wilayah merangin . Perkembangan penduduk mengalami kenaikan jumlah penduduk, dimana yang awalnya berjumlah 15 KK akan tetapi pada saat sekarang ini bertambah menjadi 20 KK. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut di dapati bahwa anak-anak Suku Anak Dalam (SAD) yang mengikuti pendidikan yang ada di sekolah formal menurun drastis, hal tersebut dapat di lihat dari data observasi pertama dimana jumlah anak yang bersekolah terdapat ada 5 orang anak akan tetapi di saat sekarang ini hanya ada satu anak yang bertahan menduduki bangku sekolah yakni di sekolah menengah keatas.

Deskripsi Hasil Observasi Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Di Desa Pauh Menang (SPA) Kabupaten Merangin Provinsi Jambi

Melakukan observasi merupakan kegiatan awal yang dilakukan oleh penulis sebelum melakukan kegiatan penelitian. Pelaksanaan Observasi dilakukan di Desa Pauh Menang (SPA), Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin. Penulis melakukan observasi secara langsung berinteraksi dengan masyarakat Suku Anak Dalam (SAD), selain itu penulis juga menelusuri informasi melalui kepala desa serta warsi lembaga yang menjadi Pembina atau membina di kawasan tersebut. Pada hari Senin tanggal 10 April 2024 peneliti datang ketempat penelitian di kawasan Suku anak Dalam (SAD) yang berada di Desa Pauh menang, Kabupaten Merangin. Peneliti menemui Kepala Desa Pauh Menang (SPA) terlebih dahulu sebelum menemui Temanggung untuk selanjutnya melakukan penelitian dengan membawa surat penelitian serta peneliti menjelaskan maksud dari penelitian dan meminta izin untuk melakukan observasi serta wawancara kepada beberapa narasumber atau informan yang sudah ditentukan. Selanjutnya peneliti datang kembali ke kawasan Suku anak Dalam (SAD) pada tanggal 12 dan 13 April untuk melakukan observasi. Dari hasil observasi tersebut penulis mendapatkan bahwasanya pendidikan yang ada di kawasan Suku Anak Dalam (SAD) menurun drastis dari data yang di peroleh sebelumnya yakni dari 5 orang anak yang mengenyam pendidikan kini hanya berjumlah satu orang anak yang mengenyam pendidikan sekolah formal, penulis juga mendapatkan bahwasanya di kawasan Suku Anak Dalam (SAD) tidak ada kegiatan pendidikan non formal yang di selenggarakan oleh dari pihak manapun baik dari lembaga warsi maupun dari pihak desa setempat. Kegiatan observasi yang dilakukan oleh penulis juga termuat hasil observasi mengenai hak-hak pendidikan yang telah didasarkan pada indikator berikut:

1. Program Pendidikan Pada Suku Anak Dalam (SAD). Program pendidikan merupakan serangkaian kegiatan pendidikan yang mempunyai tujuan –tujuan tertentu dimana keberhasilan program pendidikan selalu dilihat dari hasil belajar yang di capai oleh siswa. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 15 April 2024, di temukan fakta bahwa di dalam pemenuhan hak Pendidikan pada Suku Anak Dalam (SAD) dari pemerintah Desa maupaun dari Lembaga Warsi sendiri memiliki program. Program tersebut hanya berupa Tindakan aksi semata namun tidak secara terstruktur atau tertulis. Program yang dilakukan hanyalah sebuah pengarahan untuk anak-anak agar bersekolah di sekolah yang ada di daerah tersebut tanpa adanya dukungan seperti beasiswa untuk anak-anak yang berada di Kawasan Suku Anak Dalam (SAD) ataupun penyuluhan terhadap Orang Tua tentang penting-nya Pendidikan bagi anak-anak mereka. Di sisi lain program yang di jalankan hanya terjadi apabila ada perhatian dari pemerintah Kecamatan atau Kabupaten yang ingin turun ke Desa. kurangnya program pendidikan atau Tindakan dari pemerintah setempat ini lah yang menyebabkan kurangnya keberhasilan pendidikan yang ada di Suku Anak Dalam (SAD) sehingga banyak anak-anak pada Suku Anak Dalam (SAD) yang tidak mengenyam pendidikan baik secara formal maupun non-formal.
2. Strategi Pemenuhan Hak Pendidikan. Selain adanya program pendidikan untuk anak-anak

Suku Anak Dalam (SAD) setrategi pendidikan juga merupakan salah satu faktor terpenting di dalam menjalankan pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak Suku Anak Dalam (SAD), dimana strategi pendidikan sendiri merupakan suatu rancangan serta metode yang digunakan untuk mencapai suatu pembelajaran. Hal ini juga merupakan suatu hal yang di observasi oleh penulis pada tanggal 17 April 2024 sehingga pada permasalahan ini penulis menemui bahwasanya strategi yang di lakukan oleh pihak desa maupun dari lembaga warisi tidak berjalan dengan baik dalam implementasi maupun evaluasi. Hal itu dapat dilihat pada minimnya infrastruktur pendukung. Yang di maksud dengan minimnya infrastruktur pendukung yaitu strategi yang melibatkan penyediaan Pendidikan formal sering tidak dilengkapi dengan pembangunan infratstruktur pendukung seperti jalan yang dapat di akses maupun transportasi yang bisa digunakan untuk pergi ke sekolah. Selain itu juga strategi yang bersifat sementara atau hanya dijalankan dalam bentuk program jangka pendek. Setelah program selesai, tidak ada upaya untuk melanjutkan atau mengembangkan program tersebut. Akibatnya hasil yang ingin dicapai tidak berjalan secara maksimal cenderung hilang seiring waktu. Kesalahan dalam pelaksanaan strategi ini lah yang menunjukan petingnya pendekatan yang lebih mendalam terhadap kebutuhan, budaya, dan kondisi Suku Anak Dalam (SAD). Tanpa evaluasi yang menyeluruh dan penyesuaian berdasarkan umpan balik dari komunitas, pemenuhan hak Pendidikan akan tersu menghadapi hambatan serta permasalahan yang sama.

3. Aksesibilitas /Keterjangkauan. Pendidikan merupakan hak dasar yang seharusnya dapat di akses oleh setiap anak tanpa terkecuali. Maka dari itu, di dalam mencapai pendidikan suatu akses/keterjangkauan juga sangat berpengaruh dalam penunjang Pendidikan, akan tetapi pada saat peneliti melakukan penelitian yang di dapatkan di lapangan pada tanggal 20 April 2024 menunjukkan bahwa aksesibilitas terhadap Pendidikan terutama bagi komunitas adat terpencil atau masyarakat di daerah terpencil masih jauh dari kata berhasil. Salah satu contohnya adalah Suku Anak Dalam (SAD) yang menghadapi berbagai tantangan dalam mengkases pendidikan. Aksesibilitas yang rendah disebabkan leh beberapa faktor utama.faktor- faktor tersebut yaitu minimnya fasilitas Pendidikan seperti jarak tempuh akses jalan menuju kesekolah yang sulit di jangkau, dimana seringkali mereka harus menempuh atau menerobos jalan yang masuk kedalam hutan agar mereka bisa masuk ke sekolah formal. Ketidakstabilan aksesibilitas ini lah yang menciptakan lesengan Pendidikan yang semakin lebar antara anak-anak Suku Anak Dalam (SAD) dengan mereka yang tinggal di daerah yang lebih maju.
4. Ketersediaan. Suku Anak Dalam (SAD) merupakan salah satu kelompok masyarakat adat di Indoneisa yang sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan dalam mengakses Pendidikan yang layak. Hidup di Kawasan terpencil mereka sering menghadapi hambatan besar dalam mendapatkan layanan Pendidikan yang stabil dan berkelanjutan. Pemenuhan hak Pendidikan yang berlangsung haruslah di lakukan /memiliki fasilitas penunjang Pendidikan bagi anak-anak terutama pada anak-anak Suku Anak Dalam (SAD) seperti institusi serta progam Pendidikan.

Berdasarkan hasil obervasi yang telah di lakukan penulis pada tanggal 20 April menemukan fakta bahwa ketersediaan fasilitas Pendidikan diwilayah mereka sangat minim, bangunan sekolah yang sangat jauh dari permukiman perumahan mereka sehingga anak-anak harus menempuh perjalanan yang Panjang dan melelahkan. Tidak hanya soal jarak faktor ketersediaan Pendidikan in-formal juga menjadi salah satu permasalahan dalam pemenuhan hak Pendidikan bagi Suku Anak Dalam (SAD). Pendidikan In-formal sendiri juga sangat berperan penting bagi anak- anak yang tidak bisa mengakses Pendidikan formal sehingga tidak ada lagi alesan anak-anak yang tidak bisa menempuh Pendidikan dan tertinggal oleh

perkembangan zaman. Namun pada tantangan eksternal tersebut, tantangan internal juga menjadi salah satu penghambat di dalam pemenuhan hak Pendidikan tersebut. Tantangan internal ini berupa keterbatasan ekonomi orang tua mereka sehingga kesulitan dalam menyediakan fasilitas Pendidikan seperti alat tulis buku, pena, sepatu, serta seragam sekolah.

Deskripsi Hasil Wawancara Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Bagi anak-anak Suku Anak Dalam (SAD) Di Desa Pauh Menang (SPA) Kabupaten Merangin Provinsi Jambi

Berdasarkan subjek penelitian yang di lakukan pada BAB III, peneliti mewawancarai Kepala Desa, Lembaga Warsi, Orang Tua, anak-anak Suku Anak Dalam (SAD). Wawancara ini dilakukan atau berlangsung saat informan sedang tidak dalam berkegiatan serta peneliti meminta informasi dari informan dengan sebenar- benarnya berdasarkan pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti serta sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan. Hasil penelitian ini mengungkapkan tentang pemenuhan hak-hak pendidikan bagi anak-anak Suku Anak Dalam (SAD) serta kendala dalam pemenuhan hak-hak pendidikan tersebut. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti ini didasarkan pada indikator pemenuhan hak ekonomi dan sosial budaya (Ekosob) di bidang pendidikan. Indikator pemenuhan hak pendidikan ada 4 yaitu, Program pendidikan, Strategi pendidikan, Aksesibilitas/Keterjangkauan, serta ketersediaan (Srimargi,2014).

1. Program Pendidikan. Dalam pemenuhan hak Pendidikan program Pendidikan sangat lah penting untuk penunjang dalam membenuk generasi yang cerdas serta berdaya saing tinggi, terutama program Pendidikan bagi anak-anak Suku Anak Dalam (SAD). Program Pendidikan pada anak-anak Suku Anak Dalam (SAD) sendiri akan membawa perubahan perilaku terhadap anak-anak tersebut, pasalnya Suku Anak Dalam (SAD) yang belum pernah mengenyam Pendidikan siap menerima Pendidikan tersebut. Hal ini juga akan membawa perubahan yang dignifikan antara Suku Anak Dalam (SAD) yang terpelajar dengan Suku Anak Dalam (SAD) belum atau tidak mau mengenyam Pendidikan.
2. Strategi Pemenuhan Hak Pendidikan. Pemenuhan hak Pendidikan bagi Suku Anak Dalam (SAD) merupakan Langkah yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sekaligus mengurangi kesenjangan social. oleh karena itu perlunya strategi yang matang di dalam pemenuhan hak Pendidikan untuk anak-anak Suku Anak Dalam (SAD) agar bisa bersekolah seperti anak-anak yang lainnya.

Deskripsi Hasil Wawancara kendala Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak-Anak Suku Anak Dalam (SAD) Yang Ada Di Desa Pauh Menang (SPA)

Dalam pemenuhan Hak Pendidikan bagi anak-anak Suku Anak Dalam (SAD) juga terdapat kendala dalam pelaksanaannya yang menjadi penghambat terpenuhinya hak Pendidikan, untuk mengetahui kendala yang di hadapi selama pelaksanaan pemenuhan hak Pendidikan bagi anak-anak Suku Anak Dalam (SAD), peneliti mewawancarai sejumlah informan yaitu Kepala Desa, Lembaga Warsi, Temanggung, Orang Tua, serta anak-anak Suku Anak Dalam (SAD). Berdasarkan wawancara yang telah di lakukan dengan semua informan, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwasanya kendala pada pemenuhan hak- hak Pendidikan bagi anak-anak Suku Anak Dalam (SAD) yang utama ialah masalah perekonomian dan orang tua mereka serta kurangnya perhatian pemerintah setempat yang membuat anak-anak sangat sulit untuk mengakses Pendidikan.

Pembahasan

Penelitian ini memaparkan tentang pemenuhan hak Pendidikan bagi anak-anak yang berada di Kawasan Suku Anak Dalam (SAD) yang berada di Desa Pauh Menang (SPA) Kabupaten Merangin, dengan menggunakan penelitian kualitatif yang tentunya akan menyajikan hasil

reduksi data yang peneliti sampaikan dengan uraian yang singkat. Pembahasan ini tentunya mengacu pada rumusan masalah yang telah peneliti buat sebelumnya yang akan di jadikan acuan dalam penelitian ini yaitu bagaimana strategi yang di lakukan dalam upaya pemerdayaan hak-hak Suku Anak Dalam (SAD) untuk mnedapatkan Pendidikan dan apa saja factor-faktor yang menjadi kendala atau hambatan dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak Pendidikan bagi masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) yang berada di Desa Pauh Menang (SPA) Kabupaten Merangin.

Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan bagi masyarakat Suku Anak Dalam (SAD)

Berdasarkan hasil reduksi yang peneliti lakukan, maka dapat di uraikan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait bagaimana pemenuhan hak Pendidikan bagi anak-anak Suku Anak Dalam (SAD) dan apa kendala dalam pelaksanaan pemenuhan hak Pendidikan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, maka dalam pembahasan ini akan di bahas pemenuhan hak Pendidikan bagi anak-anak Suku Anak Dalam (SAD) di Desa Pauh Menang (SPA) indikator yang di gunakan oleh peneliti dalam deskripsi analisis penelitian ini yaitu menurut teori Srimargi (2014) yang memaparkan bahwaterdapat 4 (Empat) Indikator yang dapat digunakandalam mengukur dalam pemenuhan hak ekonomi dan sosial budaya (Ekosob) di bidang Pendidikan yaitu, (1) Program pendidikan, (2) Strategi pendidikan, (3) Akseibilitas/Keterjangkauan, serta (4) ketersediaan.

1. Program Pendidikan. Berdasarkan hasil Obsesrvasi yang peneliti peroleh, peneliti mengamati bahwa pendidikan yang ada di kawasan Suku Anak Dalam (SAD) yang berada di desa Pauh Menang (SPA) sampai saat ini masih belum berjalan dengan maksimal hal itu di tandai dengan adanya anak-anak yang belum bersekolah atau ada anak-anak yang putus sekolah. Anak-anak yang berada di kawasan tersebut mengalami kesulitan di dalam mendaptkan hak pendidikan di karenakan kurangnya program pendidikan yang menjadi penunjang keberhasilan suatu pendidikan di kawasan tersebut. Selaras dengan itu, bahwa pendapat yang dikemukakan oleh Sujatmiko (2016) program pendidikan adalah rencana keseluruhan dari aktivitas pembelajaran yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Oleh karena itu, perlunya program-program pendidikan yang dapat menunjang keberhasilan pendidikan di kawasan Suku Anak dalam (SPA) yang berada di Desa Pauh Menang (SPA). Hal ini juga di sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa program pendidikan merupakan segala bentuk kegiatan pembelajaran yang di rancang untuk membantu peserta didik mengembangkan potensi dirinya. Berdasarkan hasil Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi yang peneliti temukan bahwa program yang telah di lakukan oleh pemerintah daerah yang di bantu oleh Lembaga Warsi belum berdampak positif bagi anak-anak Suku Anak Dalam (SAD). Hal ini juga berkaitan dengan kendala-kendala yang di alami di dalam melaksanakan program pendidikan yang ada.
2. Strategi Pemenuhan Hak Pendidikan. Berdasarkan hasil Observasi yang peneliti temukan bahwa strategi Pemenuhan Hak Pendidikan yang di lakukan untuk nak-anak Suku Anak Dalam (SAD) hinga saat ini menghadapi berbagai kendala yang membuat pelaksanaanya belum berjalan dengan baik. Kemudian dari hasil wawancara bersama beberapa narasumber bahwa memang strategi yang di lakukan belum ada tindak lanjut dari pemerintah daerah itu sendiri. Menurut pendapat Paulo Freire (2015) bahwa strategi pemenuhan hak pendidikan harus mendorong kesadaran kritis. Hal itu selaras juga dengan pendapat Jhon Dewey (2017:23) bahwa startegi pemenuhan Hak Pendidikan harus berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui keasadaran pentingnya pendidikan yang harus di dukung oleh pemerintah Daerah dalam menyediakan pendidikan tanpa deskriminasi. Berdasarkan hasil Observasi, Wawancara dan dokumentasi serta pendapat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa strategi

di dalam pemenuhan hak pendidikan yang di lakukan oleh pemerintah daerah belum berjalan dengan baik hal itu lah yang membuat pendidikan yang ada di kawasan Suku Anak Dalam (SAD) belum terlaksana dengan merata. Anak-anak yang seharusnya sudah mendapatkan hak nya dalam dunia pendidikan sampai saat sekarang ini mereka belum merasakan pemerataan dalam hak pendidikan tersebut.

3. Aksesibilitas/keterjangkauan. Dari hasil Observasi yang peneliti peroleh, peneliti melihat bahwa Aksesibilitas/keterjangkauan di dalam pemenuhan hak pendidikan yang ada di kawasan Suku Anak Dalam (SAD) belum berjalan dengan baik sehingga hal tersebut yang membuat anak-anak kesulitan di dalam mengakses pendidikan. Sama halnya dengan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan dimana aksesibilitas keterjangkauan di dalam mendapatkan pendidikan masih sangat sulit di jangkau, hal tersebut dapat dilihat dari infrastruktur yang belum memadai sulitnya ekonomi orang tua serta kurangnya perhatian pemerintah perhatian pemerintah di dalam penunjang pendidikan bagi anak-anak Suku Anak Dalam (SAD). Menurut pendapat Ki Hajar Dewantara (1970) bahwa pendidikan harus di akses oleh semua kalangan tanpa deskriminasi. Menurutnya, aksesblitas pendidikan meliputi pemerataan kesempatan belajar yang yang tidak membedakan latar belakang sosial, budaya, atau ekonomi, sehingga setiap individu memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Oleh karea itu aksesibilitas atau keterjangkauan sangat penting di dalam penunjang keberhasilan suatu pendidikan bagi anak-anak Suku Anak Dalam (SAD) dimana pemerintah Derah yang di bantu oleh lembaga warsi harus memaksimalkan aksesbilitas yang mudah di akses oleh Suku Anak Dalam (SAD) dalam mendapatkan Hak Pendidikan. Dari hasil Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi yang di dapat, serta beberapa teori di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa pentingnya menstabilkan aksesbilitas atau keterjangkauan di dalam pemenuhan hak pendidikan bagi masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) agar mereka mudah dalam menempuh pendidikan. Hal itu dapat di lakukan dengan cara menyediakan kebutuhan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan seperti akses jalan menuju sekolah yang dapat mempermudah mereka bersekolah.
4. Ketersediaan. Berdasarkan hasil Observasi yang peneliti lakukan, ketersediaan di dalam pemenuhan hak Pendidikan yang telah di lakukan untuk anak- anak pada Suku Anak Dalam (SAD) belum berjalan dengan optimal, ketidak optimalan hal tersebut terjadi karena kurangnya tersedia Pendidikan yang mudah di akses oleh anak-anak Suku Anak Dalam (SAD) seperti sekolah In-formal serta guru yang memadai serta Beasiswa pendidikan untuk anak-anak Suku Anak Dalam (SAD). Hal ini sejalan dengan hasil wawancara bahwa ketersediaan penunjang pemenuhan hak pendidikan belum ada yang dapat menimbulkan dampak positif bagi Suku Anak Dalam (SAD) hal itu di tandai dengan kurangnya ketersediaan pemenuhan pendidikan yang mereka butuhkan. Selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh jhon Dewwy et al. (2017) Bahwasanya di dalam pemenuhan hak pendidikan ketersediaan pendidikan yang berhasil adalah pemenuhan yang relevan dan memberikan sumber daya yang cukup baik dalam hal pendanaan maupun tenaga pendidik yang terlatih untuk memenuhi kebutuhan pendidikan mereka. Ketersediaan pemenuhan hak pendidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan setiap individu tanpa terkecuali dapat mengakses pendidikan yang layak. Ketersediaan pendidikan mencakup lebih dari sekedar fasilitas pendidikan seperti sekolah In-Formal dan beasiswa pendidikan. Ini juga meliputi aspek ketersediaan sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan mereka, serta kesesuaian antara sistem pendidikan yang diterapkan dengan konteks sosial dan budaya masyarakat setempat.

Dari hasil Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi yang di dapat oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa ketersediaan di dalam pemenuhan hak pendidikan yang di lakukan

oleh pemerintah daerah dan dibantu oleh lembaga warisi sampai saat ini belum berjalan dengan baik, masih banyak anak-anak sulit di dalam mendapatkan hak pendidikan dikarenakan ketersediaan yang diberikan belum sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan.

Kendala Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak-Anak Suku Anak Dalam (SAD) yang berada di Desa Pauh Menang (SPA)

Dalam pemenuhan hak Pendidikan bagi anak-anak Suku Anak Dalam (SAD) yang telah dilakukan secara umum terlaksana sebagaimana harusnya oleh pemerintah Desa yang bekerja sama dengan Lembaga Warisi, namun hal itu tidak lepas pula oleh kendala-kendala yang terjadi di dalam pelaksanaannya. kendala yang menjadi penghambat di dalam terlaksananya pemenuhan hak pendidikan yaitu, ekonomi sehingga banyak keluarga Suku Anak Dalam (SAD) yang tidak mampu menyediakan perlengkapan sekolah bagi anak-anaknya. selain itu juga factor orang tua juga menjadi kendala untuk anak-anaknya bisa mendapatkan hak atas Pendidikan tersebut hal itu di karenakan kurangnya kesadaran orang tua di dalam pentingnya Pendidikan bagi anak-anak mereka. Padahal peran orang tua begitu penting dalam proses pendidikan anak. Terlepas adanya kewajiban bagi pemerintah, ternyata di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 juga diatur mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap peserta didik, hal ini diatur di dalam pasal 7 ayat (1) yang menegaskan bahwa orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya, sedangkan dalam ayat (2) orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar pada anaknya. Dalam proses pendidikan seseorang, orang tua sangat berperan sekali dalam membentuk kepribadian anak, terutama menyangkut sikap, intelektual dan kematangan anak dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu usaha dalam membina tingkah laku anak adalah melalui proses pendidikan, yang dapat dilakukan dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Harris Clemes (2019: 19) menyatakan bahwa orang tua dan anak harus membina batasan melalui praktek, orang tua perlu menjelaskan bagi diri mereka sendiri apa yang mereka harapkan untuk dilakukan atau tidak dilakukan, apa yang diharapkan, termasuk tanggung jawab untuk pekerjaan dan tugas, perlu dinyatakan dengan cara yang bisa dipahami anak, kedua orang tua perlu berpartisipasi dalam menjelaskan aturan kepada anak. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah memberikan dampak negatif terhadap proses pendidikan dan pengenalan pendidikan kepada anak- Suku Anak Dalam (SAD), tidak adanya peran pemerintah yang memadai dalam pendekatan kepada orang tua Suku Anak Dalam (SAD) membuat proses pembelajaran mengalami berbagai hambatan. Kendala-kendala yang terjadi tidak lepas pula dari kurangnya perhatian pemerintah setempat di dalam memenuhi hak Pendidikan atas anak-anak pada Suku Anak Dalam (SAD). Infrastruktur juga menjadi salah satu kendala yang tidak dapat di pungkiri bahwa kendala ini juga menjadi salah satu penghambat bagi anak-anak untuk mendapatkan hak pendidikan untuk mereka. Hal itu di sebabkan karena jarak tempuh dari rumah ke sekolah yang sulit mereka jangkau, kendala ini lah yang menyebabkan anak-anak memilih untuk tidak bersekolah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pembahasan mengenai pemenuhan hak Pendidikan bagi anak-anak Suku Anak Dalam (SAD) yang berada di Desa Pauh Menang (SPA) dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan pada bab sebelumnya mengenai pemenuhan hak Pendidikan bagi Suku anak Dalam (SAD) masih menghadapi berbagai kendala, seperti terbatasnya ekonomi keluarga, kurangnya pemahaman orang tua terhadap pentingnya Pendidikan bagi anak-anak mereka, infrastruktur yang kurang memadai serta jauhnya jarak tempuh dari rumah ke tempat sekolah. Kurangnya implementasi Program-program Pendidikan yang tidak merata dan kurang berkelanjutan. tantangan

lainnya adalah sistem Pendidikan formal yang kurang relevan dengan kehidupan serta kebutuhan budaya Suku Anak Dalam (SAD). Begitu juga dengan strategi, aksesibilitas /keterjangkauan serta ketersediaan dalam pemenuhan Pendidikan tersebut masih belum optimal adanya, hal itu dapat dilihat dari banyaknya anak-anak yang belum mengenyam Pendidikan serta banyak anak-anak yang putus sekolah dan memilih untuk membantu orang Tua mereka bekerja di kebun.

2. Berdasarkan hasil penelitian mengenai kendala pemenuhan hak pendidikan dapat di simpulkan bahwa dalam melakukan pemenuhan hak Pendidikan bagi Suku Anak Dalam (SAD) tentunya bukan suatu perkara yang mudah, hal itu di sebabkan banyaknya hambatan atau kendala yang di alami baik dari sisi internal maupun eksternal. Hambatan internal meliputi pola pikir masyarakat yang masih memprioritaskan tradisi mereka dan minimnya kesadaran akan pentingnya Pendidikan, sementara itu hambatan eksternal mencakup aksesibilitas fasilitas Pendidikan , kurangnya perhatian dari pemerintah serta dukungan infrastruktur dan kebijakan terhadap kebutuhan pada Suku Anak Dalam (SAD). Oleh karena itu, perlunya penyediaan pembangunan fasilitas Pendidikan yang mudah di jangkau oleh anak-anak Suku Anak Dalam (SAD) serta program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya Pendidikan pada generasi muda Suku Anak Dalam (SAD). Dukungan dari pemerintah atau Lembaga Non- pemerintah seperti Lembaga Warsi serta upaya masyarakat sangat penting dalam memastikan terpenuhnya pemenuhan hak Pendidikan bagi Suku Anak Dalam (SAD) terlaksana secara adil dan merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. Y., & Kodrat, D. S. (2017). Faktor-faktor penyebab kegagalan bisnis pada perusahaan mitra jaya abadi. *Jurnal Performa: Jurnal Manajemen dan Start-up Bisnis*, 2(1), 124-131.
- Amir, Latifah, Netty Netty, Dhill Noviadess, and others. 2020. "Tindakan Pemerintah Daerah Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Suku Anak Dalam Yang Mengemis Di Kota Jambi." *Sain Sosial Humaniora* 4(2): 703-14.
- Anggraini, Dian. 2022. "Analisis Pelayanan Administrasi Kependudukan Bagi Suku Anak Dalam Di Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam." Universitas Jambi.
- Aulia, Eci Trindika, Ridha Taqwa, and Dyah Hapsari. 2020. "Pemberdayaan Masyarakat Suku Anak Dalam Melalui Pendidikan Di Desa Mentawak Kabupaten Merangin Provinsi Jambi." *Jurnal Media Sosiologi* 23(1): 14-23.
- Awulle, C S E. 2020. "Penyelenggaraan Pendidikan Kristen Sebagai Pemenuhan Hak Asasi Manusia. SIKIP: Jurnal Pendidikan Agama Kristen."
- Butet Manurung. 2014. "Analisis Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Suku Anak Dalam Di Kabupaten Musi Rawas Utara." *Buku ilmu Kesejahteraan Sosial*.
- Feneteruma, Luis. 2016. "The World Until Yesterday (Dunia Hingga Kemarin)." *Buku Masyarakat dan Budaya* 18(2): 154-61.
- Hernadi Affandi (2017). 2017. "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945." *jurnal hukum POSITUM* 1(2): 218-43.
- Hidayatullah, A., & Soemantri, S. (2020). Pendidikan Kritis dan Strategi Authentic Learning: Studi Konsep Pendidikan KH. Ahmad Dahlan dan Paulo Freire. *Edukasia Islamika: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 103-120.
- Inkiwang, Rizky Rinaldy. 2020. "Kewajiban Negara Dalam Penyediaan Fasilitas Pendidikan Kepada Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional." *Lex Privatum* 8(2).
- Intan Pelangi. 2017. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. Buku Pusat Penerbitan PNRI.

- Itasari, Endah Rantau. 2018. "Implementasi Pemenuhan Hak Pendidikan Warga Negara Indonesia Di Perbatasan Darat Antara Indonesia Dan Malaysia." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 4(2): 181–86.
- Jogiyanto Hartono, M, and others. 2018. *Metoda Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data*. Buku Penerbit Andi.
- Jumyati, Jumyati, Siti Nur'ariyani, Sholeh Hidayat, and Ratna Sari Dewi. 2022. "Landasan Yuridis Pendidikan." *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 4(6): 8296–8301.
- Lestari, rian aji. 2015. "Arus Transformasi Dunia Pada Novel Sokola Rimba Karya Butet Manurung." 2(2): 115–31.
- Maryani, Dedeh, and Ruth Roselin E Nainggolan. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat*. Deepublish.
- Mukodi, Mukodi. 2018. "Tela'ah Filosofis Arti Pendidikan Dan Faktor-Faktor Pendidikan Dalam Ilmu Pendidikan." *Jurnal Penelitian Pendidikan* 10(1): 1468–76.
- Neolaka, I. A., & Neolaka, G. A. A. (2015). *Landasan Pendidikan Dasar Pengenalan Diri Sendiri Menuju Perubahan Hidup: Edisi Pertama*. Kencana.
- Novikasari, Ifada. 2016. "Uji Validitas Instrumen." Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 56.
- Nurdin, Nurdin, Defry Hamdhana, and Muhammad Iqbal. 2018. "Aplikasi Quick Count Pilkada Dengan Menggunakan Metode Sample Random Sampling Berbasis Android." *TECHSI-Jurnal Teknik Informatika* 10(1): 141–56.
- Nurwahyuliningsih, Eka. 2021. "Analisis Program Pemberdayaan Komunitas Adat." 22: 86–97.
- Parmata, Triya. 2023. "Analisis Tradisi Melangun Suku Anak Dalam Di Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun." Universitas Jambi.
- Pratama, F S, and A Auliahadi. 2022. "Sejarah Dan Perkembangan Kehidupan Suku Anak Dalam Kabupaten Merangin Provinsi Jambi (2011-2019)." *JAMBE: Jurnal Sejarah Peradaban Islam* 4(1): 14–26.
- Puspita, T. A. (2022). *Implementasi Pemenuhan Hak Kependudukan Bagi Suku Anak Dalam Di Kabupaten Batang Hari (Doctoral Dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri)*.
- Salim, Haidir, and others. 2019. *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, Dan Jenis*. Kencana.
- Setyabudi, Muhammad Nur Prabowo. 2022. "Minoritas Kepercayaan Suku Anak Dalam: Perspektif Toleransi Dan Keadilan." *Jurnal Moral Kemasyarakatan* 7(2): 151–67.
- Simaremare, T. P., Harianja, S. I., Zahra, F. M., Septiardi, F., Rohimin, M., & Sofyan, W. N. (2024). Penerapan Pembelajaran Kreatif dalam Pelaksanaan Pendidikan Nonformal Bagi Anak Usia Dini di Suku Anak Dalam Desa Sekaladi. *Kiddo: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 5(1), 1-16.
- Sujana, I Wayan Cong. 2019. "Fungsi Dan Tujuan Pendidikan Indonesia." *Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar* 4(1): 29–39
- Sukri, Sukri, Trisakti Handayani, and Agus Tinus. 2016. "Analisis Konsep Pemikiran Ki Hajar Dewantara Dalam Perspektif Pendidikan Karakter." *Jurnal Civic Hukum* 1(1): 33–41.
- Suparlan suhartono, 2007. 2007. "Tela'ah Filosofis Arti Pendidikan Dan Faktor-Faktor Pendidikan Dalam Ilmu Pendidikan." 4(2): 1468–76.
- Mukodi, M. (2018). Tela'ah filosofis arti pendidikan dan faktor-faktor pendidikan dalam ilmu pendidikan. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 10(1), 1468-1476.
- Tiara, Zenita Dwi, Didit Supriyadi, and Nelly Martini. 2023. "Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Lembaga Pendidikan." *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)* 8(1): 450–56.
- Widya, A D I 2019. 2019. "Fungsi Dan Tujuan Pendidikan Indonesia." 4(April): 29–39